2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian PPN, objek pajak PPN, Pengertian dan penjelasan tentang Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, Subjek Pajak PPN, Dasar Pengenaan Pajak, Saat terutang PPN, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta mekanisme penkreditan Pajak Masukan, yang penulisannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah.

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000(yang selanjutnya disebut sebagai UU PPN), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) dan dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya (*value added*) dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai ini timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

2.1.2 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya, fungsi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai sumber penerimaan negara/ Budgeter seperti fungsi pajak-pajak lainnya yang dikenakan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetapi ada fungsi lainnya yang membedakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pajak yang lain, seperti mengatur pola konsumsi. Sebagaimana dari pembahasan

mengenai definisi PPN pada subbab sebelumnya diketahui bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, artinya PPN dapat juga digunakan untuk membentuk pola konsumsi dalam masyarakat dengan cara mengenakan pajak atas barang-barang tertentu dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat dapat diarahkan. Fungsi lain dari PPN adalah untuk mendorong ekspor. Hal ini dapat dibuktikan dengan diberlakukannya tarif 0% atas penyerahan ekspor. Diharapkan dengan tarif 0% dapat mendorong dan meningkatkan kuantitas dan kualitas barang ekspor di pasaran luar negeri. Sistem Pajak Pertambahan Nilai juga dapat untuk mendorong investasi karena adanya mekanisme pembebasan atau pengembalian PPN barang modal. Fungsi terakhir dari PPN yang paling membedakan dengan pajak lainnya adalah karena PPN membantu pengusaha kecil. Dalam PPN pengusaha kecil dikecualikan dari kewajiban memungut PPN hal ini diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya.

2.1.3. Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa karakteristik, yaitu Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang artinya secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban). Hal ini berarti antara pemikul beban pajak yaitu pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara, atau dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak berada dalam pihak yang berbeda. Jadi, jika terjadi penyimpangan pemungutan PPN fiskus akan meminta pertanggungjawaban Pengusaha Kena Pajak tersebut.

Karakteristik PPN yang berikutnya adalah PPN sebagai pajak objektif. Artinya pungutan PPN mendasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dengan demikian sebagai pajak objektif timbulnya kewajiban untuk membayar pajak ditandai dengan adanya objek pajak tanpa membedakan apakah konsumen berpenghasilan rendah atau tinggi, apakah berupa orang atau badan sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa yang dikenakan PPN mereka tetap harus membayar

pajak. Pajak Pertambahan Nilai juga memiliki karakteristik sebagai *Multi Stage Tax* yang artinya PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur produksi dari pabrikan sampai dengan pengecer.

Atas PPN terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung dengan menggunakan *Credit Method/ Invoice Method* yang artinya pajak yang dipungut oleh PKP penjual tidak secara otomatis langsung dibayarkan kepada negara tetapi yang harus dibayarkan ke kas negara adalah hasil penghitungan mengurangkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Pajak yang dikurangkan dengan Pajak inilah yang disebut *tax credit*. Supaya mengetahui kebenaran nilai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran diperlukan suatu dokumen sebagai alat bukti, yaitu Faktur Pajak untuk itulah penghitungan PPN disebut juga dengan metode faktur.

Pajak Pertambahan Nilai juga memiliki sifat netral. Hal ini dibentuk karena adanya dua faktor yaitu, PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dan dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan, yang artinya PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi. Pajak Pertambahan Nilai juga tidak menimbulkan pajak berganda karena PPN dipungut atas nilai tambah saja.

2.1.4. Mekanisme Pemungutan PPN

Sebelum BKP atau JKP dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian pemungutan pada tiap tingkatan ini tidak menimbulkan pajak berganda karena adanya metode kredit pajak. Dalam menghitung PPN terutang ada tiga metode yaitu *Addition Method*, *Substraction Method* dan *Credit Method*.

Pada *Addition Method* ini PPN dihitung dari penjumlahan seluruh nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Adapun kelemahan dari metode ini adalah pengusaha wajib memiliki pembukuan yang tertib dan akurat untuk menentukan nilai tambah. Untuk *Substraction Method* PPN yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian dikalikan tarif pajak yang berlaku. Untuk itu diperlukan data yang akurat mengenai harga beli dan harga jual. Saat ini Indonesia menggunakan metode yang terakhir yaitu *Credit Method*. Berdasarkan metode ini PPN

terutang dihitung dari selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan.

2.1.5. Objek Pajak

Di dalam pasal 4 UU PPN disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Dari uraian UU PPN diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean, impor Barang Kena Pajak dan atas ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Adapun yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam pengertian ini adalah barang dan atau jasa yang dikenakan PPN dan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya dan dilakukan di dalam Daerah Pabean. Untuk pemungutan pajak atas impor dikenakan kepada siapapun tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau tidak. Sedangkan untuk melakukan ekspor BKP hanya diperkenankan bagi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP.

2.1.5.1 Barang Tidak Kena Pajak

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN sesuai UU PPN pasal 4 ayat 2 dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu atas barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, pasir, kerikil, batu bara yang tidak mengalami pengolahan lebih lanjut, barang kebutuhan rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, garam baik yang beryodium atau tidak juga

tidak dikenakan PPN karena barang-barang tersebut merupakan kebutuhan pangan yang penting bagi rakyat banyak dan jika dikenakan pajak akan semakin membebani hidup rakyat. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan. Penetapan ini untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena pada dasarnya makanan dan minuman tersebut sudah merupakan objek Pajak Daerah dan kelompok terakhir yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah uang, emas batangan dan surat-surat berharga.

2.1.6. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU PPN pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Yang termasuk dalam penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Dalam hal ini perjanjian meliputi transaksi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lainnya yang dapat mengakibatkan adanya penyerahan hak atas barang. Dalam perjanjian jual beli dapat jelas terlihat bahwa pembeli membayar atas harga jual barang dan bersamaan memperoleh barang tersebut dari penjual dan saat itu telah terjadi penyerahan hak atas barang. Demikian juga dengan transaksi tukar menukar, saat terjadi pertukaran saat itu juga terjadi penyerahan hak dari masing-masing pemilik BKP. Untuk transaksi jual beli dengan angsuran pada saat pembayaran yang diikuti penyerahan barang saat itu terjadi penyerahan hak.

Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing, dalam hal ini leasing dengan hak opsi juga termasuk dalam penyerahan BKP hanya untuk perjanjian sewa beli saat timbulnya objek pajak adalah pada saat pembeli membayar harga sewa tahap pertama dan pada saat itu juga barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Pengalihan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang tergolong juga dalam pengertian penyerahan BKP. Pedagang perantara yang dimaksud dalam UU PPN adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan perjanjian atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah tertentu, misalnya komisioner.

Atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma juga dianggap sebagai penyerahan BKP. Pengertian pemakaian sendiri artinya barang dagangan yang merupakan BKP digunakan sendiri untuk kepentingan PKP atau digunakan oleh karyawan, direksi. Sedangkan atas pemberian cuma-cuma yang merupakan objek pajak adalah pemberian yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, misalnya untuk kegiatan promosi perusahaan memberikan contoh barang kepada calon konsumen.

Penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang (dalam pengertian ini termasuk lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran) dan sebaliknya dianggap sebagai penyerahan BKP. Yang termasuk penyerahan BKP lainnya adalah penyerahan secara konsinyasi dan persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan.

2.1.6.1. Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak

Ada tiga pengertian penyerahan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang diatur dalam UU PPN pasal 1A ayat 2. Pertama adalah penyerahan BKP kepada makelar. Makelar dalam pengertian ini adalah orang yang menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah tertentu atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja. Hal ini berarti pada waktu kita menyerahkan BKP kepada makelar tidak dianggap sebagai penyerahan BKP karena pada dasarnya mereka menyelenggarakan usahanya atas nama orang lain.

Penyerahan JKP untuk jaminan utang piutang juga tidak dianggap sebagai penyerahan BKP demikian juga dengan penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau

sebaliknya dalam hal PKP telah memperoleh izin pemusatan dari fiskus dikecualikan dari pengertian penyerahan BKP. .

2.1.7. Jasa Kena Pajak (JKP)

Yang termasuk pengertian jasa menurut UU PPN pasal 1 angka 5 adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan JKP adalah jasa yang dikenakan pajak berdasar Undang-Undang. Sama seperti penyerahan BKP untuk kepentingan sendiri atau cuma-cuma tetap dikenakan pajak, penyerahan JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dari PKP atau karyawannya atau pemberian cuma-cuma tetap terutang pajak.

2.1.7.1. Jasa Tidak Kena Pajak

Berdasarkan UU PPN pasal 4 ayat 3 penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
2. Jasa di bidang pelayanan sosial
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
5. Jasa di bidang keagamaan
6. Jasa di bidang pendidikan
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air
10. Jasa di bidang tenaga kerja
11. Jasa di bidang perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

2.1.8. Subjek Pajak

Subjek pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan UU PPN pasal 1 angka 15 Pengusaha Kena Pajak (PKP) didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Untuk menjelaskan ruang lingkup PKP itu sendiri, PKP dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak Otomatis dan Pengusaha yang Memilih Dikukuhkan sebagai PKP atau PMPKP. (Muqodim 1999:155). Yang dimaksud sebagai Pengusaha Kena Pajak Otomatis adalah pengusaha yang secara otomatis harus memungut pajak tanpa ada alternatif lainnya. Umumnya yang dikenakan sebagai PKP Otomatis ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dalam kegiatan usahanya atau sebagai importir, dan eksportir. Dengan demikian mereka secara otomatis dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Contoh dari PKP otomatis adalah pabrikan atau produsen, pemborong atau kontraktor, penyalur utama atau agen utama, importir, pedagang eceran dan pemegang hak paten atau pemegang hak merek dagang Barang Kena Pajak.

Sedangkan pengusaha yang memilih dikukuhkan sebagai PKP (PMPKP) adalah pengusaha yang sebenarnya tidak termasuk dalam ruang lingkup PKP tetapi menyatakan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pada dasarnya mereka diberi kesempatan untuk menjadi PKP atau bukan PKP. Jika telah dikukuhkan, maka PMPKP memiliki kewajiban yang sama dengan PKP.

2.1.8.1. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak, baik itu PKP Otomatis maupun pengusaha yang memilih dikukuhkan sebagai PKP atau PMPKP memiliki kewajiban yang sama dalam UU PPN sebagaimana yang diatur dalam UU PPN pasal 3A ayat 1.

Adapun kewajiban daripada PKP adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan dan menyetor Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan yang terakhir adalah melaporkan penghitungan pajak.

2.1.9. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan UU PPN pasal 1 angka 17, dalam mengenakan PPN ada lima dasar yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu Harga Jual, Penggantian, Nilai ekspor, Nilai Impor dan Nilai Lain.

Harga jual dalam pengertian ini adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak. Dasar pengenaan harga jual digunakan dalam hal terjadi penyerahan BKP. Pengertian penggantian pada dasarnya sama dengan pengertian harga jual, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena adanya penyerahan jasa tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum di Faktur Pajak. Penggantian digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan JKP.

Dalam hal pengusaha melakukan ekspor, maka yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah Nilai Ekspor atau semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Untuk transaksi impor barang juga digunakan Nilai Impor yaitu nilai yang dijadikan dasar penghitungan bea masuk dan pungutan lainnya tidak termasuk PPN yang dipungut. Sedangkan untuk nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
- b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata
- d. Untuk penyerahan media ceritera adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film

- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar
- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual
- h. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
- j. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon.

2.1.10. Pajak Masukan

Berdasarkan UU PPN pasal 1 angka 24, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.

2.1.10.1. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip dasar dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana yang diatur dalam UU PPN pasal 9 adalah bahwa Pajak Masukan dalam suatu masa dikreditkan dengan Pajak Keluran untuk masa yang sama. Supaya Pajak Masukan dapat dikreditkan maka Pajak Masukan harus tercantum dalam Faktur Pajak Standar dan harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Untuk Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa yang sama tetap dapat dikreditkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir. Namun kondisi ini dapat terpenuhi jika syaratnya adalah Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Jika belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Jika ternyata jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka terjadi lebih bayar dan PKP berhak meminta kembali (restitusi) atau kompensasi untuk masa pajak berikutnya. Tetapi jika yang terjadi adalah jumlah Pajak Keluaran

lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah kurang bayar dan PKP wajib membayar kekurangannya tersebut kepada fiskus. Secara skematis, penghitungan PPN yang lebih atau kurang disetor dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini

Pajak Keluaran	Rp. A
(Tarif PPN x Harga Jual/ Penggantian)	
Pajak Masukan	
(Yang dapat dikreditkan)	<u>Rp. B</u>
Pajak Lebih/Kurang Bayar	Rp. C

Apabila ada PKP yang selain melakukan penyerahan terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Untuk itu diperlukan pembukuan yang akurat dari PKP supaya dapat mengetahui dengan pasti berapa penyerahan yang terutang pajak. Jika ternyata Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan yang akan dikreditkan akan dihitung dengan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan. Demikian juga untuk pengusaha yang pajak penghasilannya dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Pajak Masukannya dihitung dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.10.2. Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam UU PPN pasal 9 ayat 8 diatur mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, antara lain Pajak Masukan bagi pengeluaran BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa Pajak Masukan yang telah diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Atas Pajak Masukan bagi perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha. Kegiatan usaha yang dimaksud di sini adalah kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Jadi jika ada pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan kena pajak maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Atas pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan kombi Pajak Masukan yang diperoleh tidak dapat dikreditkan, kecuali barang-barang tersebut digunakan sebagai barang dagangan atau disewakan. Misalnya pengusaha yang memiliki usaha persewaan kendaraan, pada saat ia membeli kendaraan untuk disewakan Pajak Masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan.

Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Prinsip ini sama dengan pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum Pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan.

Untuk perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutnya berupa Faktur Pajak Sederhana, Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP tersebut tetap tidak dapat dikreditkan karena dalam Faktur Pajak Sederhana tidak terdapat informasi yang lengkap, seperti tidak tercantum nama dan NPWP pembeli atau penerima jasa. Demikian halnya dengan perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajak Standarnya tidak memenuhi ketentuan UU PPN atau istilahnya faktur Pajak cacat, Pajak Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan. Pada umumnya Faktur Pajak Standar dianggap cacat bila nama atau NPWP pembeli salah, tidak ada tandatangan dari PKP penjual atau terdapat tipe ex.

Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih dengan menggunakan surat ketetapan pajak juga tidak dapat dikreditkan. Hal ini dikarenakan surat ketetapan pajak bukanlah Faktur Pajak yang berarti bukan merupakan bukti pungutan PPN. Dalam hal terjadi pemeriksaan dan diketemukan adanya Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa maka atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena dalam hal ini berarti terjadi penyelewengan dari PKP dan sudah seharusnya Pajak Masukan yang tidak dilaporkan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Yang terakhir adalah Pajak Masukan untuk perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Umumnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah atas pembelian BKP atau perolehan JKP yang dilakukan oleh perwakilan negara asing dan badan Internasional di Indonesia. Untuk itu Pajak Masukan yang dibayar oleh PKP yang melakukan penyerahan yang dibebaskan PPN tidak dapat dikreditkan.

2.1.11. Pajak Keluaran

Sesuai dengan UU PPN pasal 1 angka 25, Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP.

2.1.12. Saat Terutang

Untuk menentukan saat PKP melaksanakan kewajiban membayar pajak diperlukan penentuan saat terutang. Dalam UU PPN pasal 11 ayat 1, terutangnya pajak terjadi pada saat terjadi penyerahan BKP dan atau JKP dimana seperti yang diketahui bahwa pemungutan PPN menganut sistem akrual yang artinya adalah pajak terutang pada saat terjadi penyerahan BKP atau JKP meskipun belum diterima pembayaran. Untuk penyerahan JKP memiliki penjelasan yang lebih spesifik yaitu pajak terutang pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Pada saat impor BKP pajak terutang pada saat BKP tersebut dimasukkan dalam Daerah Pabean.

Demikian halnya dengan ekspor terutangnya pajak pada saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan mulai memanfaatkan BKP atau JKP tidak berwujud tersebut di dalam Daerah Pabean.

2.1.12.1. Saat Terutang Pajak Atas Penyerahan Jasa Pemborong Bangunan atau Barang Tidak Bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, ditetapkan pada pasal 13 ayat 4 bahwa terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Atas penyerahan jasa pemborong bangunan atau barang tidak bergerak, dimana:

1. Sebelum jasa pemborongan itu selesai dan siap untuk diserahkan telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan, pajak terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor.
2. Setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan, meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh pemborong atau kontraktor.

Contoh penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Mei 2001, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima yang muka sebesar 15%
2. Tanggal 1 Juni 2001 pekerjaan selesai 20% diterima pembayaran tahap ke-1
3. Tanggal 1 Juli 2001 pekerjaan selesai 50% diterima pembayaran tahap ke-2
4. Tanggal 20 Agustus 2001 pekerjaan selesai 80% diterima pembayaran tahap ke-3
5. Tanggal 25 November 2001 pekerjaan selesai 100% bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan

6. Tanggal 1 Desember 2001 diterima pembayaran tahap akhir (ke-4) sebesar 95% dari harga borongan.

7. Tanggal 1 Maret 2002 diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan.

Pada angka 1 sampai dengan angka 4 pajak terutang pada tanggal diterimanya pembayaran (tahap), sedang angka 5 sampai dengan angka 7 pajak terutang pada tanggal 25 November 2001 atau saat jasa pemborongan selesai dilakukan dan diserahkan kepada pemiliknya.

Tanggal pembayaran yang tersebut pada angka 6 dan angka 7 tidak perlu diperhatikan, karena tidak termasuk saat yang menentukan terutangnya pajak sesuai dengan dasar akrual yang dianut UU PPN.

2.1.13. Tempat Terutang Pengusaha Kena Pajak

Pada prinsipnya PKP terutang baik ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan seperti yang diatur dalam UU PPN pasal 12. Hal ini utamanya berkaitan dengan PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam Daerah Pabean dan yang melakukan ekspor. Bagi PKP orang pribadi terutangnya pajak di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha sedangkan bagi PKP badan terutangnya pajak di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha.

Untuk pengusaha yang melakukan impor, tempat terutangnya pajak adalah di tempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP dan atau JKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean tempat terutangnya pajak adalah di tempat kedudukan atau kegiatan usaha.

2.1.14. Faktur Pajak

Salah satu kewajiban dari Pengusaha Kena Pajak adalah memungut PPN yang terutang. Pada saat PKP memungut pajak, maka harus membuat bukti pungutan yang menandakan bahwa pengusaha telah melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan telah memungut pajak. Untuk itu, pengusaha wajib membuat Faktur Pajak. Selain sebagai bukti pungutan pajak, Faktur Pajak juga dapat digunakan sebagai sarana untuk

mengkreditkan Pajak Masukan. Berdasarkan UU PPN pasal 1 angka 23, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun Fungsi Faktur Pajak selain sebagai bukti pungutan pajak oleh PKP atas penyerahan, pembayaran atau impor BKP atau JKP adalah sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau JKP kepada PKP atau Ditjen Bea dan Cukai. Faktur Pajak juga berfungsi sebagai sarana pengawasan administrasi pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan, baik oleh PKP penjual maupun oleh pembeli. Dari fungsi-fungsi Faktur Pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktur Pajak memiliki peranan yang penting dalam PPN.

2.1.15. Isi Faktur Pajak

Berdasarkan UU PPN pasal 13 ayat 5, dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2.1.16. Jenis-jenis Faktur Pajak

Paling tidak ada empat faktur pajak, yaitu Faktur Pajak Sederhana, Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Gabungan dan Faktur Pajak Khusus. Untuk Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang telah distandarisasi sebagai bukti pungutan pajak sehingga formulir Faktur Pajak Standar ini bentuk, format dan isinya memang disiapkan khusus sebagai faktur pajak. Faktur Pajak Standar yang lengkap merupakan syarat

utama supaya Pajak Masukan dapat dikreditkan dan Faktur Pajak Standar dibuat paling sedikit dua lembar, lembar pertama merupakan Faktur Pajak Masukan yang diberikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP, dan lembar kedua merupakan Faktur Pajak Keluaran yang menjadi arsip bagi penjual BKP atau PKP perusahaan jasa. Sedangkan Faktur Pajak Sederhana digunakan untuk menampung transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir, atau pembeli yang tidak diketahui identitasnya atau kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memerlukan Faktur Pajak Standar. Contohnya adalah bon, kuitansi, karcis, segi kas register. Faktur Pajak Sederhana ini tidak dapat digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk saat pembuatan, Faktur Pajak sederhana harus dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP atau JKP atau pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima terlebih dahulu sebelum penyerahan BKP atau JKP. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1307/2000 faktur pajak sederhana paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
- b. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

Faktur Pajak Gabungan digunakan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam satu (bulan) pajak kepada pembeli atau penerima jasa yang sama dan harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Sedangkan yang dimaksud dengan Faktur Pajak Khusus adalah dokumen-dokumen tertentu yang diberlakukan sebagai faktur pajak standar. Dokumen Faktur Pajak Khusus dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sekurang-kurangnya harus memuat identitas yang berwenang menerbitkan dokumen, nama, alamat dan NPWP penerima dokumen, jumlah satuan, Dasar Pengenaan Pajak, dan jumlah PPN yang terutang.

2.1.17. Saat Pembuatan Faktur Pajak.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-549/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar dijelaskan bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

1. Pada akhir bulan berikutnya, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap penyerahan.
4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut.

Saat pembuatan Faktur Pajak Standar ini sangat penting untuk dipahami, karena terkait dengan saat terutangnya PPN. Saat pembuatan Faktur Pajak akan menentukan kapan Pajak Keluaran akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Pajak Keluaran ini akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan pembuatan Faktur Pajak.

2.2. Jasa Konstruksi.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian Jasa Konstruksi, Jenis usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Jasa Konstruksi.

2.2.1. Pengertian Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU jasa Konstruksi), Jasa Konstruksi didefinisikan sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi. Pada pasal 1 angka 2 UU Jasa Konstruksi, pekerjaan konstruksi didefinisikan sebagai

keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

2.2.2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pada UU Jasa Konstruksi pasal 4 dijelaskan mengenai tiga jenis usaha konstruksi, yaitu:

1. Usaha perencanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak konstruksi.
2. Usaha pelaksanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
3. Usaha pengawasan konstruksi yang memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

2.2.3. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan UU Jasa Konstruksi pasal 23, penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi:

1. Tahap penyiapan yaitu kegiatan awal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan.
2. Pengerjaan yaitu:
 - a. dalam tahap perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat kelayakan, rencana umum/induk dan rencana teknis.

- b. dalam tahap pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan fisik beserta pengawasan yang menghasilkan bangunan
3. Pengakhiran yaitu kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
 - a. dalam tahap perencanaan dengan disetujuinya laporan akhir dan dilaksanakannya pekerjaan akhir.
 - b. dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan dengan dilakukannya penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakannya pembayaran akhir.

2.3. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Kaitannya Dengan Jasa Konstruksi.

Dari pembahasan mengenai PPN dan Jasa konstruksi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Jasa konstruksi tergolong sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak yang berarti sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai dan oleh karena itu, perusahaan jasa konstruksi termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak Otomatis. (Muqodim 1999: 155). Untuk itu perusahaan jasa konstruksi memiliki kewajiban memungut dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam menentukan besarnya pajak terutang untuk setiap masanya, perusahaan menggunakan Nilai Penggantian sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan JKP.

Dalam kaitannya dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran digunakan mekanisme yang telah diatur dalam UU PPN pasal 9 yaitu memadankan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama, karena jelas perusahaan melakukan penyerahan yang terutang pajak. Apabila dalam suatu masa pajak nilai Pajak Masukan lebih besar daripada nilai Pajak Keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasi untuk masa pajak berikutnya. Tetapi bila nilai Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka perusahaan harus membayar kekurangannya. Supaya Pajak Masukan dapat dikreditkan tentunya perusahaan harus memiliki bukti pungut berupa Faktur Pajak Standar, baik dari perolehan BKP maupun dari penyerahan JKP itu sendiri. Untuk menerbitkan Faktur Pajak Keluaran perusahaan harus menetapkan terlebih dahulu kapan saat terutang dari penyerahan JKP. Pada jasa konstruksi saat terutang ditentukan sesuai dengan UU PPN

pasal 1 angka 25 yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 yaitu pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam hal telah diterima pembayaran di muka atau pembayaran atas sebagian termin dan belum dilakukan penyerahan, pajak terutang pada saat pembayaran diterima oleh kontraktor. Apabila telah dilakukan penyerahan JKP tetapi belum diterima pembayaran, maka pajak terutang pada saat penyerahan tersebut dilakukan. Pada prinsipnya pengakuan saat terutang atas penyerahan JKP dilakukan secara akrual.

Setelah diketahui dengan pasti kapan terutangnya pajak, maka perusahaan dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan JKP. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-549/PJ/2000 wajib pajak diberikan tenggang waktu pembuatan Faktur Pajak sampai akhir bulan berikutnya dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan. Pada dasarnya ketentuan ini juga merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak. (Suandy, Erly 2002: 134). Akan lebih baik bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan batas waktu yang diperkenankan oleh UU PPN yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan penyerahan, selain tidak melanggar UU juga menguntungkan karena perusahaan tidak perlu menalangi pembayaran PPN. Perusahaan bahkan bisa mempergunakan dananya untuk keperluan lainnya yang lebih menguntungkan perusahaan.